JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Peran BPR dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kelurahan Ngringo berdasarkan prinsip maslahah: Studi Kasus PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda)

Lucky Kurnia Setiawan[1)*], Iin Emy Prastiwi[2)], Agus Marimin[3)]
[1, 2, 3] Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
Email: Luckykurniasetiawan@gmail.com[1)*], iinemyprastiwi24@gmail.com[2)]
agus.marimin@gmail.com[3)]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip maslahah dalam operasional serta layanan pembiayaan yang dijalankan oleh PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda), dan menganalisis peran PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kelurahan Ngringo melalui perspektif prinsip maslahah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan angket kepada nasabah pembiayaan mikro. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan analisis SWOT dan pendekatan prinsip maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro mendominasi portofolio sebesar sekitar 65% dengan tingkat risiko yang relatif terkendali. Rata-rata hasil angket sebesar 4,50 menunjukkan kategori sangat baik, yang mengindikasikan bahwa layanan pembiayaan dinilai transparan, profesional, dan bermanfaat bagi nasabah. Penerapan prinsip maslahah terealisasi pada tingkat dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah secara simultan. Selain itu, pembiayaan mikro berperan dalam meningkatkan kapasitas usaha, mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara material, psikologis, dan spiritual. Dengan demikian, PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis kemaslahatan.

Kata kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Maslahah, Pembiayaan Mikro, BPR

Abstract

This study aims to identify the application of the maslahah principle in the operations and financing services carried out by PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda), and to analyze the role of PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) in improving the economic welfare of the Ngringo Village community through the perspective of the maslahah principle. The research employed a descriptive qualitative approach supported by quantitative data. Data were collected through interviews, observation, documentation, and questionnaires distributed to micro-financing customers. Data analysis was conducted using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques, strengthened by SWOT analysis and the maslahah framework approach. The findings indicate that micro-financing dominates approximately 65% of the financing portfolio with relatively controlled risk levels. The overall average questionnaire score of 4.50 falls into the "very good" category, indicating that the financing services are perceived as transparent, professional, and beneficial by customers. The implementation of the maslahah principle is reflected in the fulfillment of dharuriyah, hajiyah, and tahsiniyah levels simultaneously. Furthermore, micro-financing contributes to business capacity improvement, reduces dependence on informal loans, and enhances community welfare materially, psychologically, and spiritually. Therefore, PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) functions not only as a financial intermediary institution but also as an instrument of economic empowerment based on maslahah principles.

Keywords*: Community Welfare, Maslahah, Microfinance, Rural Bank (BPR)*

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Pendahuluan

Aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Prinsip maslahah menjadi dasar nilai yang menuntun setiap tindakan ekonomi agar menghasilkan manfaat, menghindarkan mudarat, serta menjaga keberlangsungan hidup manusia secara bermartabat. Prinsip ini berpijak pada ajaran Al-Qur'an, termasuk firman Allah yang menegaskan bahwa manusia diarahkan menuju jalan yang membawa kebaikan dan melindungi dari kerusakan (QS. Al-Mā'idah [5]: 6). Nilai tersebut menekankan bahwa sistem sosial dan ekonomi idealnya mendukung kesejahteraan kolektif.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, berdasarkan survei demografik yang menunjukkan persentase sebesar 87,18% (Humaida et al. 2024). Kondisi tersebut menghadirkan peluang besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam praktik ekonomi di tingkat komunitas. Kehidupan masyarakat yang religius memungkinkan penanaman nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan gotong royong menjadi relevan dalam menjawab permasalahan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat (Parapat and Kisno 2019).

Fenomena kemiskinan di tingkat daerah mencerminkan tantangan yang tetap perlu diperhatikan. Kemiskinan didefinisikan sebagai keterbatasan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak, yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi (Maharani et al. 2024). Realitas tersebut sejalan dengan peringatan Al-Qur'an mengenai ancaman kemiskinan yang dapat menggiring manusia menuju kikir dan melemahkan kehidupan sosial (QS. Al-Baqarah [2]: 268).

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۤءِۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًاۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٨﴾

> *Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui* (QS. Al-Baqarah [2]: 268).

Data kemiskinan di Kabupaten Karanganyar menggambarkan situasi yang perlu perhatian. Persentase penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat sebesar 9,59% (BPS Karanganyar, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dasar. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa peningkatan kesejahteraan belum merata dan akses terhadap sarana pendukung ekonomi tetap menjadi persoalan penting. Kelurahan Ngringo sebagai bagian dari wilayah ini mencerminkan dinamika sosial ekonomi yang memerlukan dukungan institusi lokal agar dapat mengurangi hambatan kemandirian ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pengamatan lapangan, struktur ekonomi warga Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, didominasi oleh usaha mikro berbasis rumah tangga, perdagangan kecil di lingkungan permukiman, serta aktivitas ekonomi mandiri berskala harian. Jenis usaha yang banyak dijumpai meliputi warung kelontong, pedagang makanan, jasa rumahan, serta usaha produksi sederhana dengan perputaran modal terbatas. Pola pengelolaan usaha masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal, sehingga kapasitas pengembangan usaha cenderung stagnan.

Akses terhadap permodalan formal menjadi persoalan yang menonjol di wilayah Ngringo. Pelaku usaha kecil di Ngringo menghadapi kesulitan mengakses kredit dari lembaga keuangan skala besar akibat persyaratan administrasi dan jaminan yang tidak sejalan dengan

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

kondisi ekonomi mereka. Kebutuhan pembiayaan yang relatif kecil dan bersifat fleksibel lebih sesuai dilayani oleh lembaga keuangan mikro, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang telah menjadi rujukan sebagian warga dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. Keberadaan dan peran BPR memiliki relevansi langsung terhadap keberlangsungan usaha mikro di Kelurahan Ngringo, terutama dalam mendukung stabilitas pendapatan dan keberlanjutan kegiatan ekonomi warga.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan, tabungan, dan akses modal bagi masyarakat kecil. Kehadiran BPR di wilayah lokal dapat mempermudah masyarakat memperoleh layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau (Malihah et al. 2024). Layanan BPR berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, terutama jika pengelolaannya diarahkan pada pencapaian kemaslahatan. Penilaian terhadap peran BPR berdasarkan prinsip maslahah menjadi kebutuhan penting agar lembaga tersebut dapat benar-benar memberikan dampak sosial ekonomi yang konstruktif .

Penelitian mengenai BPR telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hidayat (2019) meneliti pengaruh layanan BPR terhadap perekonomian masyarakat Kecamatan Colomadu, tetapi fokusnya masih terbatas pada indikator ekonomi makro. Sementara itu, Prasetyo (2020) mengkaji kontribusi BPR terhadap perekonomian lokal melalui studi kasus BPR Nusamba, namun penelitian ini hanya menilai performa lembaga dari aspek pertumbuhan nasabah dan efektivitas layanan.

Kajian ilmiah sebelumnya mengenai BPR cenderung menitikberatkan pada aspek profitabilitas, kinerja kredit, atau pertumbuhan jumlah nasabah. Pendekatan tersebut menghasilkan informasi mengenai performa lembaga, tetapi masih sedikit penelitian yang mengkaji kontribusi BPR terhadap kesejahteraan masyarakat melalui perspektif kemaslahatan. Celah penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif. Prinsip maslahah dapat menjadi alat analisis untuk mengukur manfaat, keadilan akses, serta potensi peningkatan kualitas hidup masyarakat akibat layanan BPR.

Penelitian yang akan dilakukan mengenai peran BPR berbasis prinsip maslahah menghadirkan pendekatan baru dalam literatur ekonomi lokal dan studi kesejahteraan masyarakat. Penggunaan indikator kemaslahatan memungkinkan penilaian yang lebih menyeluruh, mencakup aspek kebermanfaatan langsung, peningkatan pendapatan keluarga, kemudahan memperoleh modal, serta stabilitas ekonomi jangka panjang.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana BPR berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Ngringo, serta bagaimana prinsip maslahah dapat menjadi indikator evaluasi efektivitas layanan lembaga keuangan mikro. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi ekonomi Islam dan ekonomi lokal, selain menjadi rekomendasi praktis bagi BPR dan pemerintah daerah dalam merancang layanan keuangan yang lebih berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

Kajian Teori

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi di tingkat lokal dan memiliki fokus utama pada pemberian layanan simpanan serta pembiayaan bagi masyarakat kecil dan menengah. BPR hadir untuk menjembatani kesenjangan akses keuangan yang sering terjadi pada masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank umum. Peran BPR tidak terbatas pada aspek finansial, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal melalui dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (Purba, Syaukat, and Maulana 2016).

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Salah satu jenis bank yang memberikan kredit, BPR, memiliki peran strategis dalam perekonomian. Kredit yang mereka berikan kepada sektor usaha riil yang berkembang menjadi modal usaha, yang pada gilirannya akan menggerakkan perekonomian (Sukarmiasih, Atmadja, and Yuniarta 2024). Lembaga keuangan yang disebut Bank Perkreditan Rakyat (BPR) didirikan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, terutama usaha kecil di Indonesia, yang membutuhkan layanan perbankan.

BPR termasuk dalam sistem keuangan Indonesia, yang terdiri dari lembaga keuangan yang berusaha mendapatkan dana dari masyarakat (Nindya Febrina Nurhapsari and Rani Apriani 2021). Oleh karena itu, lembaga tersebut dapat berupa bank atau nonbank. Sektor perbankan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menyediakan permodalan bagi sektor riil adalah fungsi penting dari perbankan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyediakan layanan pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih terbatas daripada bank umum karena mereka dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian (Lestari, Sholihin, and Widuri 2022).

Pembiayaan Mikro di BPR

Pembiayaan mikro adalah pemberian dana atau kredit dalam skala kecil kepada masyarakat yang memiliki usaha produktif atau kegiatan ekonomi yang bersifat mikro dan tradisional. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan besar (Grahesti et al. 2022). Pembiayaan mikro mendorong terciptanya kemandirian ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta menurunkan angka kemiskinan secara signifikan (Hermawan and Herdina 2019).

Dalam perspektif Islam, prinsip pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan mikro sesuai dengan nilai maslahah. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261 menegaskan "*Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji*…". Ayat ini menunjukkan bahwa setiap investasi yang bermanfaat bagi masyarakat akan kembali dengan keberkahan dan manfaat berlipat.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa pembiayaan mikro yang diberikan oleh BPR harus memperhatikan kemampuan dan potensi nasabah agar dana yang disalurkan tidak menjadi beban, tetapi menjadi sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi yang nyata.

a. Jenis dan Mekanisme Pembiayaan Mikro
   Pembiayaan mikro yang diberikan BPR biasanya meliputi (Mubarok 2018) :
   1) Kredit Modal Kerja yaitu dana yang diberikan untuk mendukung kegiatan operasional usaha harian.
   2) Kredit Investasi yaitu dana untuk pengembangan usaha atau pembelian aset produktif.
   3) Kredit Konsumtif Terbatas yaitu dana untuk kebutuhan konsumsi yang produktif dan mendukung usaha.

   Mekanisme pemberian pembiayaan meliputi analisis kelayakan usaha, penentuan besaran kredit, tenor pembayaran, dan monitoring pasca-pemberian dana (Rahmawati, 2020).
b. Manfaat Pembiayaan Mikro
   Manfaat pembiayaan mikro antara lain (Hermawan and Herdina 2019) :
   1) Memberikan akses modal bagi masyarakat yang tidak terjangkau bank besar.
   2) Mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil sehingga meningkatkan pendapatan lokal.
   3) Mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh.

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 menekankan larangan riba dan pentingnya pembiayaan yang adil dengan bunyo "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila*…". BPR yang mengelola pembiayaan mikro secara adil dan transparan memastikan masyarakat terbantu tanpa terjebak praktik yang merugikan.

Prinsip Maslahah

Prinsip maslahah dalam Islam memiliki peran sentral dalam perancangan dan pengaturan sistem keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai etis dan prinsip keadilan. Implementasi prinsip ini menjadi krusial dalam pembentukan landasan yang kokoh bagi sistem keuangan yang berkelanjutan dan inklusif (Bahruddin 2024). Maslahah merupakan konsep dalam fiqh yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat. Menurut Al-Syatibi (2002, Al-Muwafaqat), maslahah adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Berdasarkan konsep ini, Al-Syatibi membagi indikator maslahah dalam tiga aspek yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian:

a. Maslahah *Dharuriyah* (Penting/Primer)
   Aspek ini mencakup kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia, seperti keamanan harta, jiwa, agama, akal, dan keturunan. Indikator penelitian ini mengacu pada sejauh mana BPR memberikan perlindungan dan layanan yang mencegah kemudaratan terhadap aspek-aspek pokok tersebut.
b. Maslahah *Hajiyah* (Kebutuhan Sekunder)
   Indikator ini mengukur sejauh mana BPR membantu memenuhi kebutuhan tambahan yang mempermudah kehidupan masyarakat, misalnya kemudahan akses pembiayaan dan layanan keuangan yang efisien. Peneliti menilai indikator hajiyah melalui kemudahan prosedur dan aksesibilitas layanan BPR, sehingga maslahah tercapai secara optimal.
c. Maslahah *Tahsiniyah* (Kebutuhan Tersier)
   Aspek ini menekankan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas kehidupan, seperti kepercayaan, transparansi, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan BPR. Indikator *tahsiniyah* akan dianalisis melalui tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap profesionalisme dan transparansi BPR.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan terkait pekerjaan mengacu pada kepuasan kebutuhan dan persyaratan fisik dan psikologis individu yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas di lingkungan kerja atau tempat kerja yang aman dan sehat, terlepas dari hubungan kerja. Kebahagiaan dapat diukur dalam banyak aspek kehidupan.Kebahagiaan dapat diukur dalam banyak aspek kehidupan (Sastrawan, Samsi, and Seran 2024).

1) Pertimbangkan aspek penting terkait kualitas hidup, seperti kesehatan dan gizi.
2) Pertimbangkan kesehatan fisik dan lingkungan alami Anda saat menilai kualitas hidup Anda.
3) Kami mempertimbangkan kualitas hidup dari sudut pandang spiritual, termasuk institusi pendidikan dan lingkungan budaya.
4) Prioritaskan kualitas kehidupan spiritual Anda, termasuk moralitas, etika, dan keharmonisan.

a. Indikator Kesejahteraan Masyarakat
   Konsep kebahagiaan dapat diartikan sinonim dengan konsep harkat dan martabat manusia (Pratiwi and Pratama 2021). Martabat manusia diwujudkan melalui empat dimensi: (1) kesejahteraan, (2) keamanan, (3) identitas, dan (4). Sebuah ukuran

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

kebebasan. Suatu ukuran kesejahteraan yang dapat digunakan, misalnya untuk menentukan tingkat kesejahteraan seseorang. hujan. Kebebasan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan, keamanan, identitas dan kesejahteraan mereka.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang mana peneliti menjelaskan keadaan yang terjadi setelah melakukan observasi dan wawancara (Hasibuan 2019). Penulis menggunakan metode ini karena terdapat kesesuaian antara permasalahan yang dikaji dengan tujuan yang ingin dicapai yang mana peneliti membahas tentang praktik operasional BPR konvensional di Kelurahan Ngringo, khususnya dalam penerapan prinsip maslahah dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan analisis SWOT sebagai objek penelitian yang sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Metode penelitian yang digunakan meliputi studi pustaka, observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Studi pustaka bertujuan untuk mencari referensi yang relevan terhadap permasalahan penelitian melalui buku, jurnal, dan dokumen resmi sebagai landasan teori mengenai maslahah, kesejahteraan masyarakat, dan manajemen BPR (Grahesti et al. 2022). Observasi dilakukan untuk mengungkap makna suatu peristiwa dalam setting tertentu dengan melihat secara langsung operasional BPR, termasuk prosedur pelayanan, proses pembiayaan, dan interaksi staf dengan nasabah (Salim and Syahrun 2012). Wawancara dilaksanakan secara mendalam kepada pihak internal BPR, nasabah, serta masyarakat penerima pembiayaan (Salim dan Syahrun, 2012). Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen resmi. Selain itu, kuesioner disebarkan kepada nasabah dan penerima pembiayaan untuk memperoleh data mengenai tingkat kepuasan layanan, kemanfaatan pembiayaan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi, dengan jumlah responden yang bersifat fleksibel sesuai kebutuhan penelitian (Heryana 2018).

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menekankan pengumpulan, pengelompokan, dan penafsiran data sehingga dapat memberikan gambaran jelas mengenai penerapan prinsip maslahah pada BPR dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Data dianalisis dalam bentuk laporan naratif dan deskripsi. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi operasional BPR dalam menerapkan prinsip maslahah. Teknik ini membantu merumuskan strategi yang dapat memaksimalkan *Strength* (kekuatan) dan *Opportunity* (peluang), serta meminimalkan *Weakness* (kelemahan) dan *Threats* (ancaman) (Mashuri and Nurjannah 2020).



Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian yang dilakukan menganalisis implementasi pembiayaan mikro pada BPR dengan pendekatan maslahah melalui wawancara internal, wawancara eksternal (nasabah), angket kuantitatif, serta observasi langsung di kantor dan lapangan usaha nasabah.

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Cabang, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Operasional BPR

No	Indikator	Keterangan
1	Jumlah Nasabah Aktif	480 nasabah
2	Persentase Kredit Mikro	±65% dari total portofolio
3	Rata-rata Plafon Kredit	Rp10.000.000–Rp25.000.000
4	Non Performing Loan (NPL)	3–4%
5	Sistem Analisis	Survei lapangan & analisis kemampuan bayar
6	Monitoring	Kunjungan berkala & pengingat angsuran

Berdasarkan Tabel 1, jumlah nasabah aktif BPR tercatat sebanyak 480 nasabah. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa BPR memiliki basis nasabah yang cukup luas dalam melayani masyarakat, khususnya pada segmen usaha mikro dan kecil. Total portofolio pembiayaan, sekitar ±65% merupakan kredit mikro, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro menjadi produk dominan dalam struktur penyaluran dana BPR. Hal ini menunjukkan fokus lembaga dalam mendukung sektor usaha kecil dan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Rata-rata plafon kredit yang disalurkan berada pada kisaran Rp10.000.000 hingga Rp25.000.000, yang mencerminkan karakteristik pembiayaan skala mikro hingga kecil. Nominal tersebut relatif sesuai dengan kebutuhan modal usaha rumahan, perdagangan kecil, maupun usaha jasa sederhana. Tingkat Non Performing Loan (NPL) berada pada kisaran 3–4%, yang menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah masih dalam kondisi relatif terkendali. Persentase ini mengindikasikan bahwa sebagian besar nasabah mampu memenuhi kewajiban angsuran sesuai perjanjian.

Dalam aspek manajemen risiko, BPR menerapkan sistem analisis berupa survei lapangan dan analisis kemampuan bayar sebelum persetujuan kredit. Proses ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kapasitas usaha nasabah dan besaran pembiayaan yang diberikan. Di sisi lain, BPR juga melakukan monitoring melalui kunjungan berkala serta pengingat angsuran, sebagai bentuk pengawasan dan pendampingan terhadap nasabah. Sistem ini bertujuan menjaga kelancaran pembayaran serta meminimalkan potensi kredit bermasalah.

Penelitian ini melibatkan tiga responden nasabah pembiayaan mikro pada BPR, dengan karakteristik sebagai berikut:

Tabel 2. Identitas Responden

No	Nama (Samaran)	Usia	Jenis Kelamin	Jenis Usaha	Lama Usaha	Status
1	Siti Aminah	38 tahun	Perempuan	Perdagangan kecil (warung sembako)	4–6 tahun	Nasabah pembiayaan
2	Rudi Hartono	42 tahun	Laki-laki	Usaha makanan/minuman (istri berjualan keliling)	1–3 tahun	Nasabah pembiayaan
3	Sri Wahyuni	61 tahun	Perempuan	Jasa rumahan (penjahit)	> 6 tahun	Nasabah pembiayaan

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Angket

Nama Responden	Rata-Rata	Rata-Rata Pembiayaan Mikro	Rata-Rata Prinsip Maslahah	Rata-Rata Total Kesejahteraan
Siti Aminah	4,71	4,86	4,75	4,33
Rudi Hartono	4,50	4,43	4,75	4,33
Sri Wahyuni	4,29	4,29	4,50	4,00

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Angket Maslahah

Informan	Total Skor	Rata-rata	Kategori
Siti Aminah	66	4,71	Sangat Baik
Rudi Hartono	61	4,50	Sangat Baik
Sri Wahyuni	63	4,29	Sangat Baik
Rata-rata Keseluruhan	—	4,50	Sangat Baik

Penelitian melibatkan tiga responden nasabah pembiayaan mikro pada BPR. Berdasarkan Tabel 2, karakteristik responden menunjukkan variasi usia, jenis usaha, serta lama menjalankan usaha. Siti Aminah (38 tahun) merupakan pelaku perdagangan kecil (warung sembako) dengan lama usaha 4–6 tahun. Rudi Hartono (42 tahun) bergerak pada usaha makanan/minuman yang dijalankan oleh istrinya dengan lama usaha 1–3 tahun. Sementara itu, Sri Wahyuni (61 tahun) menjalankan jasa rumahan sebagai penjahit dengan pengalaman usaha lebih dari 6 tahun. Ketiganya berstatus sebagai nasabah pembiayaan aktif. Berdasarkan Tabel 3, hasil rekapitulasi angket menunjukkan bahwa seluruh responden memberikan penilaian tinggi pada setiap aspek yang diukur. Siti Aminah memperoleh rata-rata keseluruhan 4,71, dengan rincian rata-rata aspek pembiayaan mikro sebesar 4,86, prinsip maslahah 4,75, dan kesejahteraan masyarakat 4,33. Rudi Hartono memperoleh rata-rata keseluruhan 4,50, dengan rata-rata pembiayaan mikro 4,43, prinsip maslahah 4,75, dan kesejahteraan masyarakat 4,33. Sementara Sri Wahyuni memperoleh rata-rata keseluruhan 4,29, dengan rata-rata pembiayaan mikro 4,29, prinsip maslahah 4,50, dan kesejahteraan masyarakat 4,00. Nilai tersebut menunjukkan bahwa aspek pembiayaan mikro dan prinsip maslahah memperoleh penilaian sangat baik dari para responden. Berdasarkan Tabel 4, total skor masing-masing responden menunjukkan kategori “Sangat Baik”. Siti Aminah memperoleh total skor 66 dengan rata-rata 4,71, Rudi Hartono memperoleh total skor 61 dengan rata-rata 4,50, dan Sri Wahyuni memperoleh total skor 63 dengan rata-rata 4,29. Rata-rata keseluruhan sebesar 4,50 menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan mikro pada BPR dinilai sangat baik dalam mendukung prinsip maslahah serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kelurahan Ngringo, baik secara material, psikologis, maupun spiritual.

Hasil wawancara dengan Kepala Cabang menunjukkan bahwa fokus utama penyaluran pembiayaan berada pada sektor mikro produktif. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan:

> *“Sebagian besar nasabah kami adalah usaha mikro. Kami tidak hanya melihat jaminan, tetapi juga kelayakan usaha dan karakter nasabah.”*

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan tidak semata-mata berbasis agunan, tetapi mempertimbangkan aspek kelayakan usaha dan karakter peminjam. Pendekatan ini mencerminkan orientasi pemberdayaan usaha kecil. Terkait risiko kredit, beliau menyampaikan bahwa tingkat kredit bermasalah (NPL) berada pada kisaran 3–4% dan masih dalam batas terkendali. Dalam menghadapi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, pendekatan yang digunakan bersifat solutif, sebagaimana disampaikan:

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

> *"Kalau ada nasabah kesulitan, kami upayakan restrukturisasi. Prinsipnya bukan langsung menekan, tapi mencari solusi."*

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya mekanisme restrukturisasi sebagai bentuk mitigasi risiko sekaligus perlindungan terhadap keberlangsungan usaha nasabah.

Wawancara dengan analis kredit mengungkapkan bahwa proses analisis dilakukan melalui survei lapangan secara langsung. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan:

> *"Kami survei langsung ke tempat usaha. Kami cek perputaran usaha, penghasilan, dan tanggungan keluarga."*

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa analisis kelayakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil usaha dan kemampuan bayar nasabah. Monitoring pasca pencairan juga dilakukan secara berkala, sebagaimana disampaikan:

> *"Kalau ada tanda-tanda kesulitan, kami komunikasi lebih dulu sebelum jatuh tempo menunggak lama."*

Hal ini menunjukkan adanya sistem pengawasan aktif yang bertujuan mencegah keterlambatan pembayaran menjadi kredit bermasalah.

Petugas layanan menekankan pentingnya transparansi informasi kepada nasabah sejak awal pengajuan kredit. Hal tersebut diungkapkan melalui pernyataan:

> *"Kami jelaskan bunga, tenor, dan angsuran sejak awal supaya tidak ada kesalahpahaman."*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelayanan dilakukan dengan prinsip keterbukaan informasi agar nasabah memahami kewajiban yang akan dijalankan. Selain itu, pelayanan diarahkan agar nasabah merasa nyaman dan tidak tertekan selama proses administrasi berlangsung, yang menunjukkan pendekatan komunikatif dalam pelayanan publik.

Temuan Wawancara Nasabah (Eksternal) bersama Siti Aminah menerima pembiayaan sebesar Rp10.000.000 yang digunakan untuk menambah stok barang dan memperbaiki fasilitas warung sembako. Dalam wawancaranya menyatakan:

> *"Setelah dapat tambahan modal, stok barang jadi lengkap. Pembeli makin banyak, bahkan sekarang saya bisa tambah satu karyawan bantu jaga warung."*

Kutipan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas usaha serta penambahan tenaga kerja. Selain itu, ia juga menyampaikan:

> *"Sekarang saya tidak pernah telat bayar listrik dan bisa menabung sedikit."*

Pernyataan ini menunjukkan adanya peningkatan stabilitas ekonomi rumah tangga setelah menerima pembiayaan.

Nasabah lain yaitu Rudi Hartono memperoleh pembiayaan sebesar Rp7.000.000 yang dimanfaatkan sebagai modal usaha makanan matang keliling yang dijalankan istrinya sejak tahun 2024. Dalam wawancaranya menyampaikan:

> *"Dulu sering pinjam ke tetangga buat beli bahan. Sekarang sudah tidak lagi, usaha istri cukup membantu kebutuhan sehari-hari."*

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pembiayaan berkontribusi pada pengurangan ketergantungan terhadap pinjaman informal. Ia juga menambahkan:

> *"Memang penghasilan saya tidak tetap, tapi dari jualan ini jadi lebih tenang."*

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya peningkatan rasa aman dan stabilitas pendapatan keluarga.

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Nasabah terakhir yang dimintai keterangan adalah Sri Wahyuni yakni menerima pembiayaan sebesar Rp8.000.000 yang digunakan untuk membeli mesin jahit dan mesin obras guna menunjang usaha jahit rumahan. Hal ini disampaikan pada saat wawancara sebagai berikut:

> *"Dengan mesin baru, jahitan lebih cepat selesai. Pesanan juga lebih banyak karena hasilnya lebih rapi."*

Kutipan tersebut menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dan kualitas hasil kerja. Sri Wahyuni juga menambahkan:

> *"Saya tidak bergantung pada anak, masih bisa usaha sendiri walaupun sudah tua."*

Pernyataan ini menunjukkan adanya kemandirian ekonomi meskipun responden telah memasuki usia lanjut. Sri Wahyuni juga pernah mengalami penurunan usaha sehingga sempat mengalami keterlambatan pembayaran.

> *"Waktu usaha turun, saya sempat menunggak. Tapi pihak BPR memberi keringanan dan penjadwalan ulang."*

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi dilakukan sebagai bentuk penyesuaian pembayaran tanpa memberikan tekanan berlebihan, sehingga usaha tetap dapat berjalan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kantor BPR memiliki ruang pelayanan yang tertata rapi dengan sistem administrasi semi-manual. Proses survei dilakukan langsung ke lokasi usaha nasabah, sesuai dengan keterangan analis kredit. Interaksi antara staf dan nasabah berlangsung komunikatif dan persuasif. Namun, sistem digitalisasi belum sepenuhnya optimal dan ruang tunggu relatif terbatas pada jam pelayanan ramai. Observasi di lokasi usaha menunjukkan bahwa kegiatan usaha nasabah berjalan aktif dan produktif, serta pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan pengajuan.

Permasalahan Penelitian

BPR memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil yang seringkali tidak terjangkau oleh bank umum. Namun, tantangan utama bukan hanya pada penyaluran kredit, melainkan pada sejauh mana pembiayaan tersebut benar-benar memberikan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Sebagian penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek kinerja lembaga seperti pertumbuhan nasabah, profitabilitas, dan efektivitas layanan. Sementara itu, dimensi sosial dan kemaslahatan sebagai tujuan utama ekonomi Islam belum banyak dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada analisis implementasi pembiayaan mikro BPR dengan pendekatan prinsip maslahah serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Kelurahan Ngringo.

Analisis SWOT Implementasi Pembiayaan Mikro BPR

Berdasarkan hasil wawancara, angket, dan observasi, implementasi pembiayaan mikro dianalisis menggunakan pendekatan SWOT sebagai berikut:

a. *Strength* (Kekuatan)

1) Kredit mikro menjadi portofolio dominan (±65%), menunjukkan fokus pada sektor usaha kecil.
2) Tingkat NPL relatif terkendali (3–4%), mencerminkan manajemen risiko yang baik.
3) Sistem analisis berbasis survei lapangan dan kemampuan bayar.
4) Monitoring aktif melalui kunjungan berkala dan komunikasi preventif.
5) Tingkat kepuasan dan kepercayaan nasabah sangat tinggi (rata-rata 4,50).

Kekuatan ini menunjukkan bahwa BPR memiliki fondasi operasional yang cukup stabil dalam mendukung pembiayaan mikro berbasis kehati-hatian.

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

b. *Weakness* (Kelemahan)

1) Sistem administrasi masih semi-manual.
2) Digitalisasi layanan belum optimal.
3) Ruang tunggu relatif terbatas saat jam ramai.
4) Proses tetap memerlukan survei dan waktu analisis sehingga belum sepenuhnya cepat.

Kelemahan ini bersifat teknis-operasional, bukan pada aspek substansi pembiayaan.

c. *Opportunity* (Peluang)

1) Tingginya kebutuhan modal usaha mikro di masyarakat.
2) Potensi penguatan ekonomi lokal melalui sektor UMKM.
3) Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
4) Peluang pengembangan layanan digital untuk efisiensi.

d. *Threat* (Ancaman)

1) Fluktuasi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan bayar nasabah.
2) Persaingan dengan lembaga keuangan lain.
3) Risiko usaha mikro yang rentan terhadap penurunan omzet.

Berdasarkan pemetaan tersebut, posisi BPR berada pada Kuadran I (*Strength–Opportunity*), yaitu kondisi yang relatif menguntungkan karena memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang besar. Strategi yang tepat adalah mendukung pertumbuhan yang progresif namun tetap berbasis prinsip kehati-hatian.

Secara konseptual, BPR merupakan lembaga keuangan mikro yang berfungsi sebagai intermediary institution yang menjembatani kebutuhan permodalan masyarakat kecil dengan sumber dana yang tersedia. Teori perbankan mikro menegaskan bahwa BPR hadir untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang seringkali tidak terjangkau oleh bank umum. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 65% portofolio pembiayaan BPR merupakan kredit mikro. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi benar-benar diarahkan pada sektor usaha kecil dan menengah. Temuan tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa BPR menjadi penggerak ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM. Kondisi ini relevan dengan penelitian Purba et al. (2016) yang menyimpulkan bahwa BPR berperan signifikan dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pembiayaan produktif.

Pembahasan/diskusi

Penerapan Prinsip *Maslahah* pada PT BPR BPK Tasikmadu dalam Operasional dan Layanan Pembiayaan yang diberikan Kepada Masyarakat

Penerapan prinsip maslahah pada PT BPR BKK Tasikmadu tercermin dalam operasional pembiayaan yang mempertimbangkan manfaat nyata bagi nasabah. Pembiayaan diarahkan pada keberlangsungan usaha, kemampuan bayar, dan kondisi sosial ekonomi. Analisis kredit dilakukan melalui survei lapangan dan penilaian kemampuan bayar berdasarkan kondisi usaha, pendapatan, dan tanggungan keluarga. Hasil penilaian menunjukkan bahwa pembiayaan disesuaikan dengan kapasitas riil nasabah, mencerminkan maslahah hajiyah melalui kemudahan akses dan pengurangan beban pembayaran.

Pengelolaan risiko terlihat dari tingkat NPL 3–4% yang masih terkendali. Nasabah yang mengalami kesulitan diberikan restrukturisasi berupa penjadwalan ulang atau penyesuaian angsuran. Kebijakan ini menjaga keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi, sesuai dengan *maslahah dharuriyah*. Pelayanan dilakukan secara terbuka melalui penyampaian informasi bunga, tenor, dan angsuran sejak awal. Interaksi yang komunikatif menciptakan kenyamanan bagi nasabah dan mencerminkan *maslahah tahsiniyah* dalam kualitas layanan. *Monitoring* dilakukan melalui kunjungan berkala dan komunikasi preventif untuk mengawasi

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

perkembangan usaha dan mencegah keterlambatan pembayaran. Pola ini berfungsi sebagai pendampingan dalam menjaga kelancaran pembiayaan.

Hasil angket menunjukkan rata-rata 4,50 dengan kategori sangat baik, yang mencerminkan tingkat kepuasan dan kepercayaan nasabah. Penilaian tinggi pada aspek pembiayaan, prinsip maslahah, dan kesejahteraan menunjukkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dessy Isfianadewi (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan mikro mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan melalui akses modal yang sesuai kebutuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian antara praktik pembiayaan mikro dengan prinsip maslahah dalam mendorong keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi masyarakat. Penerapan prinsip maslahah terlihat pada pemenuhan kebutuhan usaha, kemudahan akses pembiayaan, dan kualitas pelayanan. Pembiayaan berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi nasabah.

Peran *Prinsip Maslahah* pada PT BPR BKK Tasikmadu dalam Meningkatkann Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ngringo berdasarkan Prisip *Maslahah*.

Peran prinsip maslahah pada PT BPR BKK Tasikmadu terlihat pada peningkatan kesejahteraan ekonomi nasabah yang bersifat nyata. Pembiayaan yang diberikan berdampak pada perkembangan usaha, stabilitas pendapatan, dan kemandirian ekonomi. Pada aspek usaha, pembiayaan digunakan untuk menambah modal, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperbaiki kualitas layanan. Siti Aminah mengalami peningkatan stok barang dan mampu menambah tenaga kerja. Sri Wahyuni meningkatkan produktivitas melalui penggunaan mesin jahit dan obras. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kapasitas usaha yang berdampak langsung pada pendapatan.

Pada aspek stabilitas ekonomi, pembiayaan membantu nasabah memenuhi kebutuhan dasar secara lebih teratur. Nasabah tidak lagi mengalami keterlambatan pembayaran kebutuhan rumah tangga dan mampu menyisihkan sebagian pendapatan. Rudi Hartono tidak lagi bergantung pada pinjaman informal, sehingga beban ekonomi menjadi lebih ringan. Keadaan ini mencerminkan maslahah dharuriyah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kestabilan hidup. Pada aspek kemudahan dan rasa aman, proses pembiayaan yang mempertimbangkan kemampuan bayar serta adanya kebijakan restrukturisasi memberikan ruang bagi nasabah dalam menghadapi kondisi usaha yang tidak stabil. Sri Wahyuni tetap dapat menjalankan usaha meskipun sempat mengalami penurunan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan penerapan maslahah hajiyah melalui pengurangan kesulitan ekonomi. Pada aspek kualitas hidup, pembiayaan mendorong kemandirian ekonomi dan rasa percaya diri nasabah. Nasabah mampu menjalankan usaha tanpa ketergantungan pada pihak lain serta memiliki rasa aman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini mencerminkan maslahah tahsiniyah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup.

Hasil angket menunjukkan rata-rata kesejahteraan berada pada kategori sangat baik dengan nilai di atas 4,00. Nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan secara material dan psikologis yang dirasakan langsung oleh nasabah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2019) dan Prasetyo (2020) yang menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan juga mencakup dimensi kemaslahatan. Peran prinsip maslahah terlihat pada peningkatan kapasitas usaha, stabilitas ekonomi, dan kemandirian nasabah. Pembiayaan berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip maslahah pada PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) telah terimplementasi secara nyata dalam operasional dan layanan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari proses analisis pembiayaan melalui survei lapangan, penilaian kemampuan bayar, serta monitoring berkala untuk menjaga keberlangsungan usaha nasabah. Hasil angket menunjukkan rata-rata sebesar 4,50 dengan kategori sangat baik, yang mengindikasikan bahwa layanan pembiayaan dinilai transparan, profesional, dan memberikan manfaat bagi nasabah. Implementasi tersebut mencakup tiga tingkatan maslahah, yaitu maslahah dharuriyah melalui perlindungan kebutuhan dasar dan stabilitas ekonomi keluarga, maslahah hajiyah melalui kemudahan akses pembiayaan dan proses yang tidak memberatkan, serta maslahah tahsiniyah melalui peningkatan kepuasan dan kepercayaan nasabah. Selain itu, pembiayaan mikro yang mendominasi sekitar 65% portofolio turut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha, penambahan stok dan tenaga kerja, serta pengurangan ketergantungan masyarakat pada pinjaman informal. Dengan demikian, BPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagi PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda), disarankan untuk mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko agar tingkat pembiayaan bermasalah tetap terkendali. Peningkatan kualitas layanan melalui penguatan sistem administrasi, optimalisasi digitalisasi, dan pendampingan usaha yang lebih intensif juga perlu dilakukan agar manfaat pembiayaan dapat dirasakan secara berkelanjutan. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan kajian lembaga keuangan mikro berbasis prinsip maslahah, dengan memperluas analisis pada aspek kinerja keuangan, dampak sosial, dan kemaslahatan masyarakat melalui perspektif ekonomi Islam serta kesejahteraan multidimensional.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian atau melakukan perbandingan terhadap beberapa BPR agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip maslahah dalam pembiayaan mikro. Penelitian berikutnya juga dapat mempertimbangkan variabel tambahan, seperti inklusi keuangan, literasi keuangan, dan dampak jangka panjang pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Selain itu, penggunaan jumlah responden yang lebih luas dan pendekatan longitudinal diharapkan dapat memperkuat analisis serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan lembaga keuangan mikro berbasis kemaslahatan.

Referensi

Bahruddin, Ibnu. 2024. “Konsep Maslahah Dalam Pembangunan Ekonomi Umat.” *Al–A’mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4(Desember):119–34.

Grahesti, Angrahita, Fahma Nafii’ah, Elyana Pramuningtyas, and Fakultas Ekonomi Bisnis. 2022. “Investasi Hijau Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(03):3374–82. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6443.

Hasibuan, Hanisyah. 2019. “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.” *Skripsi*.

Hermawan, Irwan, and Vina Herdina. 2019. “Hubungan Antara Variabel Ekonomi Makro Dengan Pembiayaan UKM (Usaha Kecil Menengah) Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan* 1(1):50–68. doi: 10.52005/aktiva.v1i1.19.

Heryana, Ade. 2018. "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif." *Universitas Esa Unggul* (December):14.

Humaida, Afif, Ilma Dian Fasicha, M. Rifan Alghifari, and Puji Sri Lestari. 2024. "Potensi Industri Halal Di Indonesia Sebagai Negara Berpenduduk." *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 6(1):11–24.

Isfianadewi, Dessy. 2023. "Business Ecosystem & Strategy Microfinance Practices versus Sustainable Welfare." *International Journal Of Business Ecosystem & Strategy* 5(4):79–89.

Lestari, Dinar Dwinta, Ustadus Sholihin, and Trisnia Widuri. 2022. "Analisis Manajemen Kredit Untuk Menekan Terjadinya Kredit Macet Pada PT BPR Sumberdhana Anda Di Tulungagung." *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 2(3):145–59.

Maharani, Chika, Devi Amelia Ningrum, Aulia Eka Fatmawati, and Arif Fadilla. 2024. "Dampak Kemiskinan Terhadap Kualitas Pendidikan Anak Di Indonesia : Rekomendasi Kebijakan Yang Efektif." *Pubmedia* 1(3):1–10.

Malihah, Septiana, Anisa Sundhusiah, Aditia Ramadani, and Rini Puji Astuti. 2024. "Analisis Bank Perkreditan Rakyat (BPR)." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2:313–19.

Mashuri, Mashuri, and Dwi Nurjannah. 2020. "Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1(1):97–112. doi: 10.46367/jps.v1i1.205.

Mubarok, Faizul. 2018. "Dinamika Makro-Mikro Pada Pembiayaan Musyarakah." *Islamadina* 19(2):59. doi: 10.30595/islamadina.v19i2.3209.

Nindya Febrina Nurhapsari, and Rani Apriani. 2021. "Penyelesaian Antara Nasabah Dan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perkara Tunggakan Pembayaran Kredit." *Krtha Bhayangkara* 15(1):103–16. doi: 10.31599/krtha.v15i1.568.

Parapat, Eka Pratiwi Septania, and Kisno Kisno. 2019. "Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Simalungun." *Owner* 3(1):140–43. doi: 10.33395/owner.v3i1.96.

Prastiwi, Iin Emy, and Muhammad Naufal Zuhdi. 2022. "Analysis Of Factors Affecting Interest In Saving In Islamic Bank: Knowledge, Social Environment And Psychological Factors." *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 2022(2):770–85.

Pratiwi, Septia Ayum, and Abdul Aziz Nugraha Pratama. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Muslim Kabupaten Semarang." *Journal of Economics Research and Policy Studies* 1(2):91–105. doi: 10.53088/jerps.v1i2.105.

Purba, Novyanti Nora, Yusman Syaukat, and Tb. Nur Ahmad Maulana. 2016. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Penyaluran Kredit Pada Bpr Konvensional Di Indonesia." *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 2(2):105. doi: 10.17358/jabm.2.2.105.

Salim, and Syahrun. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 5th ed. edited by Haidir. Bandung: Citapustaka Media.

Sastrawan, Berry, Adrianus Samsi, and Gotfridus Goris Seran. 2024. "Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat." *Karimah Tauhid* 3(1):473–79. doi: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.11642.

Sukarmiasih, Ni Made, Anantawikrama Tungga Atmadja, and Gede Adi Yuniarta. 2024. "Eksistensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Tengah Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pada PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia Di Provinsi Bali)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 14(3):473–84. doi: 10.23887/jiah.v14i3.84410.